



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan transisi tahun 2007-2008 akan habis masa berlakunya pada tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - c. bahwa dalam masa sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun oleh bupati yang baru, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 berpedoman pada Program Indikatif Kabupaten Banyumas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembangunan Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 4 Seri A);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDIKATIF
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1). Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Tahun 2009 dan merupakan solusi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya;
- (2). Penyusunan program Indikatif Kabupaten Banyumas bertujuan untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013 yang akan ditetapkan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dilantik, dengan memperhatikan hasil kajian konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
- b. Kegiatan tersebut huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Program Indikatif Kabupaten Banyumas tahun 2009 merupakan landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 4

Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 disusun dengan sitematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- d. BAB IV : KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAERAH
- e. BAB V : POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 19 FEB 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Februari 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS

H.M. SANTOSO, SH, MHum.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 SERI B

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TANGGAL : 19 FEB 2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 150 ayat (3) huruf d, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Pada saat ini Kabupaten Banyumas memiliki RPJMD Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008. Dengan berakhirnya masa berlaku RPJMD tersebut pada tahun 2008, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013. Namun demikian pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas secara langsung dilaksanakan pada Bulan Pebruari Tahun 2008 dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik pada Bulan April Tahun 2008, dengan demikian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, baru akan ditetapkan paling lambat pada Bulan Juli 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Musrenbang Kabupaten Banyumas dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2009 harus dilaksanakan paling lambat Bulan Maret 2008, oleh karena itu proses awal penyusunan RKPD Tahun 2009 (Musrenbang Desa/Kelurahan) harus sudah dimulai pada Bulan Januari Tahun 2008. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang dimaksud Program Transisi adalah program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJMD berakhir, guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan

kepala daerah. Dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2009 diperlukan pedoman dalam bentuk Program Indikatif Kabupaten Banyumas tahun 2009.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2009, ditetapkan dengan maksud untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah guna memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 adalah sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari Tahun 2008, dan sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rencana (Rerja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan .
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah/Kota.
21. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas;

D. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan program indikatif dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis, perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana wilayah.

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat isu strategis, kebijakan, strategi dan prioritas program pembangunan tahun 2009.

BAB IV KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAERAH

Memuat kondisi makro perekonomian, prospek ekonomi, arah kebijakan umum anggaran tahun 2009.

BAB V POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat program-program utama yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2009.

BAB VI PENUTUP

Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan kaidah pelaksanaannya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan barat yang terletak pada posisi strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Bandung) pada lintas selatan menuju arah timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya) atau sebaliknya dan dari Jawa Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (Ibukota Kabupaten Tegal) menuju Cilacap, wilayah tengah Pegunungan Dieng dan Semarang maupun ke Yogyakarta atau sebaliknya.

Mengacu pada kondisi lokasi strategis serta beberapa kajian potensi alamiah maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun pengembangan regional Jawa Tengah ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut :

- a. Dalam kerangka pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pusat pengembangan wilayah (disebut dengan kawasan Purwokerto dan sekitarnya) dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto (merupakan salah satu dari lima kota yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional/PKN di Provinsi Jawa Tengah) dengan wilayah pelayanan meliputi beberapa kota, yaitu kota Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan kota-kota ibukota kecamatan di Kabupaten Banyumas seperti Banyumas, Sokaraja, Ajibarang, Sumpiuh, Wangon dan sebagainya.

Penetapan wilayah ini bertitik tolak dari kondisi :

- a. Fungsi Kota Purwokerto sebagai daerah yang memegang peranan penting di bagian barat daya Jawa Tengah serta keberadaan fasilitas yang berskala nasional seperti perguruan tinggi, kawasan pariwisata Baturraden, dan menjadi titik penting pertumbuhan wilayah serta perhubungan transportasi Jakarta – Surabaya melalui wilayah selatan.
 - b. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki sektor unggulan meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan industri, serta merupakan wilayah kerjasama strategis Provinsi Jawa Tengah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).
- b. Dalam kerangka pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah prioritas dengan arah pengembangan sebagai berikut :

- a. Kawasan kerjasama strategis dalam Provinsi, yaitu kawasan Purwokerto dan sekitarnya sebagai kawasan yang merupakan daerah berbasis pertanian
- b. Kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas) antara Jawa Barat dan Jawa Tengah
- c. Kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan penanganan banjir dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan.

Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak diantara $108^{\circ}39'17''$ BT - $109^{\circ}27'15''$ BT dan diantara $7^{\circ}15'05''$ LS - $7^{\circ}37'10''$ LS, memiliki karakteristik topografi bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya merupakan dataran tinggi dan perbukitan terletak di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet dan di sebelah Selatan wilayah kabupaten membentang perbukitan Serayu.

Karakteristik topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Kondisi ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai relief bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya merupakan dataran tinggi dan perbukitan terletak di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet dan di sebelah Selatan wilayah kabupaten membentang perbukitan Serayu.

A. KONDISI SAAT INI

1. KONDISI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

a. Transportasi

Berdasarkan status jalan, panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Banyumas mencapai 4.459,47 Km yang terbagi atas jalan nasional 198,84 Km, jalan provinsi 18,26 Km, jalan kabupaten 804,78 Km dan jalan desa/kelurahan 3.437,59 km.

Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2006 menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Ruas jalan kabupaten kondisi baik dan sedang pada tahun 2005 sebesar 60,57% menunjukkan kenaikan menjadi sebesar 68,44% pada tahun 2006, sedangkan untuk ruas jalan kabupaten kondisi rusak dan rusak berat mengalami penurunan dari 39,43% pada tahun 2005 menjadi 31,56% di tahun 2006. Pada tahun anggaran 2007 ruas jalan kabupaten kondisi baik dan sedang menjadi sebesar 77,63% atau 624,75 Km dan kondisi rusak dan rusak berat menjadi 22,37% atau 180,03 Km.

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2006 adalah 178.107 unit, baik kendaraan roda dua, roda empat atau lebih. Dengan jumlah panjang jalan di Kabupaten Banyumas 4.459,47 Km, rasio jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas adalah 0,034.

b. Telekomunikasi

Pertumbuhan telekomunikasi di Kabupaten Banyumas saat ini dan dimasa mendatang berkembang dan meningkat secara signifikan. Kecenderungan tersebut akan lebih menggairahkan bagi para penyelenggara (operator) telekomunikasi untuk mengembangkan bisnisnya dan hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi turutan/pendukung (complementary) dan sektor-sektor lainnya karena apabila sarana dan prasarana telekomunikasi telah tersedia serta terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor lainnya akan jasa telekomunikasi diharapkan dapat terpenuhi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan telekomunikasi akan terjadi lebih intens begitu juga sebaliknya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling memperkuat antara sektor telekomunikasi dengan sektor lainnya.

c. Perumahan dan Permukiman

Kondisi perumahan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan perkembangan yang membaik. Berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya perkembangan perubahan fisik perumahan milik masyarakat berupa kecenderungan meningkatnya persentase jenis rumah layak huni semakin meningkat. Dalam sisi status kepemilikan rumah, persentase tertinggi kepemilikan adalah milik sendiri, pada tahun 2006 perumahan dengan status milik sendiri sebesar 91,47%. Jenis atap pada perumahan yang ada sebagian besar adalah terbuat dari genteng dan seng. Jenis dinding bangunan rumah 65,83 % adalah tembok dan sebesar 14,4% adalah bangunan rumah dari bambu. Jenis lantai pada umumnya (78,96 5) adalah bukan tanah namun keadaan rumah tanpa lantai (tanah) masih cukup tinggi yaitu 21,04%.

d. Pengairan/Sumberdaya Air

Prasarana pengairan atau irigasi merupakan prasarana yang penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Banyumas. Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di

Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2005 dikelompokkan dalam kategori : untuk DI dengan luas areal > 3.000 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terdapat 2 DI yaitu DI Serayu dan DI Tajum dengan luas areal potensial seluas 6.276,96 Ha dan luas areal fungsional seluas 5.564,38 Ha. DI dengan luas areal antara 1.000 Ha s/d 3.000 Ha yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi (DI lintas kabupaten) terdapat 5 DI yaitu DI Banjaran, DI Andongbang, DI Kedunglimus Arca, DI Kebasen, dan DI Kalisapi dengan luas areal potensial seluas 4.378,34 Ha dan dengan luas areal fungsional seluas 4.260,99 Ha.

Untuk DI dengan luas areal dibawah 1.000 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibagi menjadi 2 yaitu DI pemerintah meliputi 91 DI dengan luas areal potensial seluas 8.519,09 dan luas areal fungsional seluas 8.353,57 Ha dan DI Perdesaan meliputi 370 DI dengan luas areal potensial seluas 9.837,66 Ha dan luas areal fungsional seluas 8.814,67 Ha.

Atas dasar hal tersebut di atas, jumlah DI di Kabupaten Banyumas sebanyak 466 DI dengan luas areal potensial seluas 28.320,47 dan luas areal fungsionalnya mencapai 26.334,98 Ha.

e. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, zona Serayu, dan pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari barat Laut – Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir sampai dengan pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit sekitar 45 456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Tajum, Kranji, Pelus, Banjaran, Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya, sedangkan air permukaan yang berasal dari berbagai sumber mata air mempunyai debit sekitar 974.462 liter/detik/tahun.

Curah hujan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2006 rata-rata sebesar 2.579 mm/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor tahun 1983 dapat diketahui jenis tanah di Kabupaten Banyumas terdapat 7 jenis tanah, yaitu Aluvial, Glei Humus Rendah, Regosol, Litosol, Andosol, Latosol dan Podsolik.

Kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah seperti umumnya wilayah-wilayah di Indonesia. Rata-rata suhu udara bulanan 26,3°C, dengan suhu minimum tercatat 24,4°C dan suhu maksimum 30,9°C. Sedangkan curah hujan di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2006 rata-rata sebesar 2.579 mm/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas yaitu terletak di lereng Gunung Slamet. Beberapa daerah yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturaden dan hasil catatan stasiun penakar hujan Baturaden yaitu 4.292 mm/tahun, Kecamatan Sumpiuh dengan stasiun penakar hujan di Desa Kebokura 5.663 mm/ tahun, stasiun panakar hujan di Desa Bongangin 3.633 mm/tahun dan stasiun otomatis di Desa Sumpiuh 3.671 mm/ tahun, Kecamatan Cilongok dengan stasiun penakar hujan di Desa Cikidang 4.323 mm/ tahun.

Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas adalah bencana banjir dan gerakan tanah. Bencana banjir terjadi di wilayah selatan Kabupaten Banyumas, yaitu di wilayah Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan Kemranjen. Bencana alam berupa gerakan tanah yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada kawasan hutan maupun pada tepi sungai dengan kondisi lahan terjal atau pada lokasi terjal dengan curah hujan tinggi.

Bencana alam berupa gerakan tanah ini erat kaitannya dengan sifat fisik lahan, sifat dan posisi batuan, struktur geologi, keterjalannya, penggunaan lahan serta kondisi keairannya. Daerah dengan sedimen marin lempung dan medan terjal banyak terjadi gerakan tanah. Mineral lempung ini memiliki sifat plaster yaitu akan mengembang pada saat kekurangan air dan mengerut pada saat jenuh air. Batuan ini ditindih oleh batuan gunung api sehingga pada daerah kontakannya sering terjadi longsoran. Daerah terjal dengan curah hujan tinggi juga rawan terhadap longsoran. Demikian halnya aktifitas manusia seperti *cut and fill* (gali dan timbun) terhadap lereng juga meningkatkan resiko tanah longsor.

f. Penataan Ruang

Tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional merupakan satu kesatuan ruang wilayah nasional yang meliputi ruang darat, udara dan lautan sebagai sumberdaya yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, berhasilguna, secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan. Masyarakat Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tetapi disadari bersama bahwa pengelolaan penataan ruang belum dapat berjalan dengan optimal. Kondisi tersebut terjadi karena rencana tata ruang yang merupakan matra ruang dari pembangunan daerah belum bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, dan daya dukung lingkungan terutama dalam keterkaitan dengan kerentanan terhadap bencana belum mendapat perhatian yang cukup. Aspek keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan sektoral. Di samping itu pemahaman dan kesadaran akan perlunya pengendalian pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan penataan ruang oleh masyarakat masih relatif rendah.

g. Pertanian

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banyumas secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tanah sawah dan tanah kering. Penggunaan lahan untuk kegiatan tanah kering mempunyai porsi yang cukup besar, yaitu 99.737,56 ha atau 75,13% dari total wilayah di Kabupaten Banyumas sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan sawah mempunyai porsi sebesar 33.022 ha atau 24,87% dari total wilayah Kabupaten Banyumas.

Dari lahan sawah seluas 31.958,226 Ha di Kabupaten Banyumas, berdasarkan potensinya terbagi atas porsi lahan sawah beririgasi teknis seluas 10.037,023 Ha (31,40%), irigasi setengah teknis seluas 6.385,388 Ha (19,98%), irigasi sederhana 4.287,628 Ha (13,41%), irigasi desa seluas 4.179,853 Ha (13,08%), dan irigasi tadah hujan 7.068,336 Ha (22,12%)

Penggunaan lahan untuk kegiatan perkotaan yang ditunjukkan untuk kegiatan pekarangan juga menunjukkan kondisi yang cukup dominan, yaitu sebesar 19.866 ha atau 14,96% dari total wilayah di Kabupaten Banyumas. Penggunaan lahan perkotaan ini berlokasi di pusat kegiatan regional (Kabupaten), yaitu di Kota Purwokerto, berada di pusat kegiatan yang lebih

rendah baik tingkat lokal (Kecamatan dan desa) dan pada lokasi strategis lain dengan dukungan kemudahan aksesibilitas dengan keberadaan prasarana dan sarana transportasi.

Dilihat dari perkembangan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 1996 – 2000 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan hutan rakyat dan penggunaan lahan sawah pengairan sederhana merupakan jenis penggunaan lahan yang banyak mengalami konversi (perubahan penggunaan lahan) di wilayah Kabupaten Banyumas dan konsekwensinya penggunaan lahan ini mengalami penurunan luas lahan. Penggunaan lahan hutan rakyat mengalami perubahan rata-rata 4,25%/tahun sedangkan penggunaan lahan sawah pengairan sederhana mengalami konversi sebesar 3,59%/tahun. Sedangkan penggunaan lahan yang juga mengalami konversi lahan tetapi menunjukkan kecenderungan penambahan luas lahan untuk penggunaan lahannya adalah jenis penggunaan lahan pekarangan, perkebunan, penggembalaan dan tegalan.

Perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten memberikan informasi bahwa jenis penggunaan lahan yang banyak mengalami perubahan lahan menjadi jenis penggunaan lahan lain adalah sawah dan hutan rakyat. Sedangkan jenis penggunaan lahan yang banyak melakukan infasi atau merubah penggunaan lahan lain adalah jenis penggunaan lahan pekarangan, perkebunan dan penggembalaan. Proses invasi dan konversi lahan di wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan terjadi proses perubahan penggunaan lahan sawah atau hutan rakyat menjadi penggunaan lahan perkotaan, seperti perumahan, industri, perkantoran dan lain-lain yang dalam hal ini ditunjukkan dengan penggunaan lahan pekarangan atau menjadi penggunaan lahan tegalan dan penggembalaan. Proses ini merupakan proses berdasarkan keidiah alamiah atau proses pasar (market), dimana terjadi perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan yang kurang produktif seperti menjadi penggunaan lahan yang lebih produktif.

2. KONDISI EKONOMI DAERAH

a. Perkembangan Ekonomi

Secara umum kondisi Perekonomian Kabupaten Banyumas telah mengarah pada kondisi yang lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan perkembangan PDRB Tahun 2001-2006 selalu mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2006 mengalami

kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2006 sebesar 4,48 % sedangkan tahun 2005 mencapai sebesar 3,21 %.

Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar Harga Konstan pada tahun 2005 menduduki peringkat 12. Kemudian bila dilihat dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 menduduki peringkat 11.

Perekonomian Kabupaten Banyumas masih didukung oleh sektor pertanian, yang rata-rata menyumbangkan 21,67 persen dari PDRB Kabupaten Banyumas. Disamping sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa merupakan penyumbang yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Banyumas.

Beberapa sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas dari tahun 2002 – 2006 selalu meningkat yaitu sektor listrik, sektor perdagangan dan sektor keuangan. Sedang sektor yang cenderung mengalami penurunan peranan terhadap PDRB Kabupaten Banyumas diantaranya sektor pertanian. Walaupun sektor pertanian sumbangannya cenderung menurun, tetapi masih merupakan sektor yang dominan di Kabupaten Banyumas. Secara umum dengan berkurangnya kontribusi sektor pertanian, menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banyumas terdapat kecenderungan mulai bergeser dari perekonomian agraris menjadi perdagangan dan jasa-jasa.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Jawa Tengah, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar. Selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Secara umum dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun lalu merupakan dasar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang akan datang dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah dari aspek ekonomi. Selama Periode tahun 2001-2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berkisar 1.13 sampai 4.48 persen, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002.

Dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas masih rendah, rata-rata dari tahun 2002-2006 untuk Jawa Tengah sebesar 4.65 % sedang Kabupaten Banyumas 3.35%.

Secara sektoral, selama periode tahun 2002-2006 semua sektor di Kabupaten Banyumas laju pertumbuhannya berfluktuasi. Sektor yang pertumbuhannya paling berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan adalah sektor pertanian.

Sektor keuangan perkembangannya sangat baik, yakni menempati laju pertumbuhan tertinggi kedua. Hal ini didukung karena semakin banyak bank-bank umum yang membuka cabang dan beroperasi di wilayah Purwokerto. Sedangkan Jawa Tengah untuk Tahun 2002-2005 hampir seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan kearah positif, kecuali sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.

Pada tahun 2006, sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang paling besar (6,87%), sektor perdagangan (6,72%) dan disusul sektor jasa-jasa (6,70%). Sedangkan sektor industri merupakan sektor pertumbuhan terendah yaitu 3,24%.

PDRB Perkapita Kabupaten Banyumas dari Tahun 2002 – 2006 terus mengalami peningkatan. Tahun 2002 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 2.625.967 rupiah, tahun 2006 menjadi sebesar 4.150.760 rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2002 sebesar 2.163.321 rupiah, tahun 2006 menjadi sebesar 2.427.574 rupiah. Pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2005 atas dasar harga berlaku menempati urutan ke 26 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2005 atas dasar harga konstan menempati urutan ke 27 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

b. Inflasi

Tingkat inflasi Kota Purwokerto sejak Januari sampai dengan Desember 2006 tercatat sebesar 8,45% atau lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional 6,60%, namun jauh lebih rendah dibanding tingkat inflasi Kota Purwokerto pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,54%.

c. Perbankan

Perkembangan jumlah perbankan di Kabupaten Banyumas cukup banyak baik dilihat dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit. Perkembangan jumlah perbankan di Kabupaten Banyumas meningkat tajam dari 104 buah Bank Umum dan BPR pada tahun 2002 menjadi 126 pada tahun 2006 yang terdiri dari kantor pusat

Bank Umum ada 30 unit, kantor cabang 20 unit, kantor cabang pembantu 22 unit, kantor kas 13 unit dan BRI Unit 41 unit.

Penghimpunan dana masyarakat yang tercatat pada Bank Indonesia Purwokerto, yang meliputi dana Rupiah dan Valuta Asing pada akhir tahun 2006 sebesar Rp. 2.757.035.000.000,- (meliputi giro Rp.330.148.000.000,-; Simpanan berjangka Rp.1.145.678.000.000,- ; dan Tabungan Rp.1.291.209.000.000,-) atau naik 16,35 % dibanding tahun 2005 dan kredit yang diberikan sebesar Rp.1.972.174.000.000,- atau naik 15,77% dari tahun 2005, sehingga terdapat surplus dana sebesar Rp.794.861.000.000,-. Dilihat dari total penghimpunan dana, Kabupaten Banyumas menduduki peringkat ke 6 sementara penyaluran kredit peringkat menjadi 5 se Propinsi Jawa Tengah tahun 2005.

d. Industri

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Banyumas, sektor industri kecil masih merupakan industri yang terbanyak / andalan dengan jumlah unit usaha sebanyak 41.119, industri sedang sebanyak 13.159 unit usaha dan industri besar sebanyak 70 unit usaha.

e. Pariwisata

Kegiatan pariwisata Kabupaten Banyumas telah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Ada 10 obyek wisata yang sudah berjalan yaitu Lokawisata Baturaden, Kalibacin, Curug Cipendok, Wana Wisata, Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, Telaga Sunyi, Bumi Perkemahan, Curug Gede, Curug Ceheng, Museum Wayang, Museum Panglima Jenderal Soedirman, dan Taman Rekreasi Fatmaba Ajibarang.

Tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Banyumas dari tahun 2000 sampai dengan 2006 berfluktuasi, tingkat kunjungan tertinggi tercatat pada tahun 2000 yang mencapai jumlah 912.233 orang dan tahun 2006 dengan jumlah pengunjung 605.415 dengan Pendapatan dari Pajak / Retribusi Pariwisata tahun 2006 sebesar Rp. 3.186.320.857 dengan pertumbuhan rata-rata Wisatawan Nusantara 5,37 % dan wisatawan mancanegara 7,89 %.

Untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas terdapat 159 hotel yang terdiri hotel bintang tiga sebanyak 6, bintang satu sebanyak 1 sisanya melati sebanyak 152. Disamping itu terdapat Restoran dan Rumah Makan sebanyak 317, Biro Perjalanan Wisata sebanyak 15, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Diskotik) sebanyak 5.

f. Perdagangan

Sektor perdagangan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyumas cenderung naik. Hal ini didukung dengan adanya sarana perdagangan pasar tradisional 21 buah, pasar local 122 buah, pasar swalayan 21 buah, Mal / Plasa 1 buah.

Jumlah Pengusaha Perdagangan terdiri dari Perdagangan kecil 12.987 buah, Perdagangan Menengah 936 buah dan Perdagangan besar 99 buah.

g. Koperasi dan UKM

Perkembangan koperasi di Kabupaten Banyumas mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan pada periode 2004 – 2006, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva (modal) dan volume usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi meningkat dari 423 unit tahun 2004 menjadi 442 pada tahun 2006. Jumlah anggota koperasi tahun 2004 sebanyak 105.227 orang meningkat menjadi 106.026 orang pada tahun 2006, volume usaha meningkat tahun 2004 sebesar Rp. 133.265.000.000,- menjadi Rp. 135.774.000.000,- pada tahun 2006. Sisa Hasil Usaha meningkat dari Rp. 2.692.000.000,- tahun 2004 menjadi Rp. 3.089.000.000,- pada tahun 2006.

h. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas. Perekonomian Kabupaten Banyumas juga masih didukung oleh sektor pertanian yang rata-rata menyumbangkan 21,67 persen dari PDRB Kabupaten Banyumas. Sebagai sektor yang mendukung ketahanan pangan perkembangan sektor pertanian selama 5 tahun mengalami perkembangan yang relatif kecil. Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Komoditas utama sub sektor pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai. Produksi padi maupun beras selama 5 tahun masih surplus dimana produksi pada tahun 2003 mencapai 215.487 kg dan konsumsi 173.610 kg sedangkan pada tahun 2006 produksi beras 199.809 dan konsumsi 175.940 kg namun cenderung menurun sedangkan jagung dan kedelai masih mengalami minus produksi.

Untuk sub sektor peternakan hampir seluruh jenis ternak mengalami penurunan populasi seperti sapi potong pada tahun 2003 populasinya 18.210 ekor namun pada tahun 2006 menurun menjadi 13.241 ekor,

Kambing pada tahun 2003 sejumlah 224.806 ekor menurun menjadi 214.878 ekor pada tahun 2006 demikian juga dengan ayam buras pada tahun 2003 1.363.817 menurun populasinya pada tahun 2006 menjadi 1.160.952 ekor pada tahun 2006.

Perkembangan di sub sektor perikanan produksi hasil perikanan tahun 2002 sebesar 122.359.103 Kg meningkat menjadi 142.352.048 kg, konsumsi protein hewani asal ternak rata-rata 4,162 gr/kap/hr, ikan 3,1 gr/kap/hr dan masih berada di bawah standar nasional yang mencapai 6 gr gr/kap/hr dan 9 gram/kap/hr.

Sementara di Sektor Perkebunan komoditas karet mengalami perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2003 luas areal 66 ha dengan produksi 0,96 ton menjadi 111,650 ha pada tahun 2006 dengan produksi 9,53 ton sementara komoditas yang lain seperti teh, kopi lada, tembakau dan vanili relatif stabil. Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara. Luas hutan negara mencapai 28.384 ha terdiri atas hutan produksi 18.468,60 ha dan hutan lindung 9.615,20 ha sedangkan hutan rakyat mencapai 19.405,042 ha. Produksi hasil hutan meliputi kayu bulat, kayu olahan, rotan maupun damar. Luas lahan kritis cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2003 dimana pada tahun 2003 luas lahan kritis mencapai 15.755 ha pada tahun 2006 mencapai 17.000 ha. Adapun penanganan lahan kritis baik secara reguler maupun melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan selama 5 tahun telah mencapai 6.524 ha yang berarti terdapat ketidakseimbangan antara rehabilitasi hutan dan penebangan hutan.

i. Pertambangan dan Energi

Kabupaten Banyumas dilihat dari segi geologi merupakan daerah yang mempunyai berbagai macam bahan galian, terutama bahan galian golongan C. Batuan beku dan batuan sedimen tersebar merata di seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga sangat potensial untuk pengembangan jenis usaha pertambangan bahan galian golongan C. Adapun potensi tersebut antara lain :

- a. Fosfat dengan cadangan 236.059 ton di Desa Damakradenan Kecamatan Lumbir dan 520.970 ton di Desa Sawangan Kecamatan Kebasen
- b. Batu gamping cadangan 442.161.173 ton di Desa Damakradenan Kecamatan Ajlbarang
- c. Granodiorit dengan cadangan keseluruhan 36.849.249 ton

- d. Batu temple (Andesit) dengan cadangan 310.000 ton di Kecamatan Kedungbanteng dan Pekuncen
- e. Andesit Hornblende dengan cadangan 201.388,14 ton di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng dan
- f. Beberapa wilayah memiliki potensi batuan Basalt, Kaolin, Tanah liat, Oker, Trass, Pasir, Batu pasir, Sirtu, Tanah urug

Sampai dengan tahun 2007 jumlah Desa / Kelurahan berlistrik di Kabupaten Banyumas telah mencapai 100 % (332 Desa / Kelurahan), namun Rasio Elektrifikasi (RE) atau penduduk yang berlistrik baru mencapai 66,182 % artinya sekitar 252.910 KK / Rumah tangga yang baru menikmati listrik dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sekitar 388.004 rumah tangga atau sekitar 135.093 rumah tangga (34,818 %) yang belum menikmati listrik. Jumlah grumbul yang belum menikmati listrik sekitar 515 grumbul.

j. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Banyumas didukung oleh keberadaan Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas. Perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengembangkan teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya lembaga pendidikan tersebut, namun demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum setara dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Secara umum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Banyumas. Namun beberapa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menunjukkan peningkatan pemanfaatannya adalah bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Berkembangnya teknologi telpon seluler memberikan pengaruh yang cukup baik dalam perkembangan sektor-sektor lain di bidang ekonomi dan sosial budaya. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas telah mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, meskipun masih perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut. Mekanisme perdagangan telah menggunakan jasa teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan dan mempercepat proses transaksi perdagangan.

3. KONDISI PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA DAERAH

a. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas semakin menurun sedangkan penduduk usia muda dengan prosentase anak dibawah 15 tahun masih cukup tinggi, yaitu tahun 2006 sebesar 26,28% dan penduduk lanjut usia (usia 65 tahun ke atas) hanya sebesar 7,17% sehingga rasio beban ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Banyumas menjadi 50,25%, yang berarti setia 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) akan menanggung sekitar 50 orang yang dianggap belum produktif (usia di bawah 15 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Penduduk Kabupaten Banyumas secara berturut-turut sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 mengalami pertumbuhan penduduk menurun yaitu tahun 2002 jumlah 1.509.367 jiwa, 2003 berjumlah 1.524.901 jiwa atau bertambah 1,0187 % ; tahun 2004 berjumlah 1.538.285 jiwa atau bertambah 0,8701 % ; tahun 2005 berjumlah 1.545.299 jiwa atau bertambah 0,4539 % ; tahun 2006 berjumlah 1.552.252 jiwa atau bertambah 0,4479 % dan diharapkan pada tahun 2007 pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tidak lebih dari 0,4479 %. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun ini, karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas terhadap pentingnya program Keluarga Berencana dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik dan umur perkawinan yang semakin tinggi yaitu 22 tahun pada tahun 2002 menjadi 24 tahun pada tahun 2006.

b. Pendidikan

Salah satu Program Pemerintah di bidang Pendidikan adalah pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang terdiri atas 6 tahun di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 3 tahun di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Dalam penuntasan wajib dikdas 9 tahun perlu ditempuh berbagai cara agar semua anak usia 7 – 15 tahun dapat tertampung disekolah.

Berdasarkan data tahun 2006 daya tampung TK menunjukkan bahwa dari sejumlah 657 TK yang ada, dapat menampung 24.025 siswa dengan jumlah rombel 372, sedangkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun 57.233 jiwa, sehingga perlu menambah daya tampung untuk 35.433 siswa.

Daya tampung SD/MI menunjukkan bahwa dari 882 SD dan 171 MI yang ada maka sarana SD/MI tersebut cukup, karena dari 178.549 siswa SD/MI terbagi menjadi 6.888 rombel sehingga tiap rombel rata-rata 25,92 anak. Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 162.885 jiwa, dengan

APK 109,24 % dan APM 98,80 %. Dengan demikian tinggal dimotivasi untuk memperbesar daya serap.

Daya tampung SMP/MTs menunjukkan bahwa jumlah ruang belajar yang ada di SMP/MTs adalah 1.961 ruang, Adapun jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 75.954 siswa terbagi menjadi 1.896 rombel, sehingga tiap rombel rata-rata 40,06 anak. Dari 75.954 siswa SMP/MTs yang berusia 13 – 15 tahun sebanyak 64.457 anak, sedangkan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun sebanyak 85.586 orang, usia sekolah yang belum tertampung sebanyak 9.632 orang.

Dengan ketersediaan Ruang TK yang sebanyak 738 ruang dan kebutuhan ruang sebanyak 872 ruang maka terdapat kekurangan sebanyak 134 ruang. Ketersediaan ruang untuk SD ruang sebanyak 5.753 ruang, dan kebutuhan ruang sebanyak 5.606 ruang, dengan demikian tidak terdapat kekurangan ruang, sedangkan ketersediaan ruang untuk MI sebanyak 1.000 ruang, dan kebutuhan sebanyak ruang 1.025 ruang, maka terdapat kekurangan sebanyak 25 ruang. Ketersediaan ruang untuk SMP/MTs sebanyak 1.961 ruang, dan kebutuhan ruang sebanyak 2.140 ruang, maka terdapat kekurangan sebanyak 179 ruang.

Kerusakan Gedung/Ruang SD terdapat 1.650 ruang rusak berat dan 1.689 ruang rusak ringan yang perlu segera diperbaiki sedangkan MI terdapat 122 ruang rusak berat dan 203 ruang rusak ringan yang perlu segera diperbaiki; SMP/MTs terdapat 92 ruang rusak berat dan 194 ruang rusak ringan yang perlu segera diperbaiki.

Keadaan dan lokasi sekolah yang tersebar di 27 kecamatan menunjukkan bahwa untuk SD dan MI berjumlah 1.053 cukup merata; SMP dan MTs berjumlah 179 cukup merata; SMA, SMK dan MA berjumlah 100 penyebarannya belum begitu merata khususnya SMK Negeri.

Untuk jenjang pendidikan SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 109,24% dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 98,80%; untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPT Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 89,50 % dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 76,63% untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 48,42 % dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 37,59 %

Pada Tahun 2002 angka melek huruf di Kabupaten Banyumas sebanyak 89,6 % dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 93,3 % dari jumlah penduduk. Dengan demikian masyarakat yang ikut melaksanakan pendidikan semakin meningkat.

c. Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2006 capaian indikator tersebut antara lain :

1. Angka kematian ibu sebesar 96,13/100.000 Kelahiran Hidup;
2. Angka kematian bayi sebesar 10,35/1.000 Kelahiran Hidup.
3. Status gizi balita untuk gizi buruk balita (pengukuran berdasar berat badan/tinggi badan) 62; gizi kurang 5.582; gizi baik 79.191; gizi lebih 2.408.
4. Angka kesakitan malaria (API) sebesar 0,17/1.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 246 kasu ; Angka Kesakitan DBD (IR) sebesar 20/100.000 penduduk dengan jumlah penderita DBD sebanyak 329 kasus ; Angka Kesakitan TB Paru sebesar 34/100.000 penduduk dengan jumlah penderita TB Paru sebanyak 533 kasus ; HIV jumlah penderita sebanyak 123 ; Angka Kesakitan Pnemonia sebesar 283/100.000 penduduk dengan jumlah penderita pnemonia sebanyak 4.371 ; sedangkan diare sebanyak 30.941

Angka kematian ibu dari tahun 2005 menunjukkan penurunan dari 126,96 per 100.000 kelahiran hidup menjadi pada tahun 2006 sebesar 96,13 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran ibu akan kesehatan.

Angka kematian bayi dari tahun 2005 menunjukkan peningkatan dari 2,46 per 1000 kelahiran hidup menjadi pada tahun 2006 sebesar 10,35 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini diakibatkan antara lain keterlambatan dan status gizi ibu yang kurang baik. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2005 sebesar 69,40 tahun kemudian meningkat menjadi 69,50 tahun pada tahun 2006. Semakin tinggi usia harapan hidup mencirikan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Penolong kelahiran pertama yang ditangani oleh dokter, bidan dan dukun dari tahun 2005 menunjukkan perubahan yang semakin baik. Pada tahun 2005 penolong kelahiran pertama oleh dokter sebesar 3,90 % dan tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 11,87 % ; sedangkan oleh bidan tahun 2005 sebesar 51,10 % dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 69,20 % ; dan oleh dukun tahun 2005 sebesar 43,71 % pada tahun 2006 menurun menjadi 18,93 %. Perubahan yang semakin baik ini dikarenakan pemahaman masyarakat akan kesehatan anak dan tingkat resiko akibat kelahiran semakin meningkat .

Begitu juga penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan dan dukun dari tahun 2005 menunjukkan perubahan yang positif. Penolong kelahiran terakhir yang ditangani oleh dokter sebesar 4,38 % dan tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 11,50 % ; sedangkan oleh bidan tahun

2005 sebesar 62,22 % dan tahun 2006 meningkat 70,67 % ; dan oleh dukun tahun 2005 sebesar 30,80 % , pada tahun 2006 menurun menjadi 16,65 %.

d. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2006 untuk laki-laki 11.863 orang dan perempuan 9.431 orang. Jumlah peluang kerja di Kabupaten Banyumas menurut sektor adalah sektor pertanian 950 orang, sektor industri 2.801 orang, sektor perdagangan 9.992 orang, dan jasa-jasa 3.856 orang.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas pada tahun 2006 adalah sebesar 8,36%. Jumlah penganggur terbuka, untuk laki-laki 8,48% dan perempuan 8,14%.

e. Kemiskinan

Jumlah Penduduk/Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten Banyumas dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan , sedangkan tahun 2005 dan 2006 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin tahun 2001 sebesar 468.936 jiwa atau 39,2 % ; tahun 2002 sebesar 336.800 jiwa atau 32,18 %; tahun 2003 sebesar 322.773 jiwa atau 21,5 %; tahun 2004 sebesar 325.200 jiwa atau 21,48 % ;

Jumlah Rumah tangga miskin tahun 2005 sebesar 175.570 RTM atau 42,36 % dan tahun 2006 sebesar 175.514 RTM atau 42,32 % . Kenaikan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2005 dan 2006 sebagai dampak dari adanya 2 kali kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

f. Pemerintahan

Sejak dicanangkannya Kabupaten Banyumas sebagai percontohan otonomi daerah, telah memberikan perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun bidang kemasyarakatan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*public service*), pemberdayaan masyarakat, kemandirian daerah dan memajukan perekonomian daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah juga diimbangi dengan pelaksanaan otonomi desa secara nyata dan bertanggung jawab, sebab penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam pemberian bantuan yang bersifat stimulan maupun dalam bentuk block grant melalui alokasi dana desa (ADD).

Perubahan paradigma otonomi daerah ditunjukkan pula adanya *good governance*, yang membawa konsekuensi adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu mekanisme penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan eksternal (masyarakat) yang profesional.

Oleh karena itu kelembagaan pengawasan internal juga perlu diberdayakan selaku aparat fungsional yang setiap saat bisa digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Unit pengawasan ini secara operasional dapat membantu tugas-tugas pemerintah daerah secara simultan dan kontinyu dengan memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat diharapkan lebih dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan prima secara nyata, walaupun hal tersebut belum terpenuhi.

Dalam konteks penanganan perizinan, kelembagaan penanganan perizinan telah dilakukan oleh KPPi (Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi), namun kompleksitas dalam berbagai hal tentang perizinan masih diperlukan terobosan-terobosan baru agar pelayanan perizinan bisa lebih efektif dan efisien.

Delapan jenis perizinan dari 4 bidang (pariwisata, pertambangan, pertanian dan perhubungan) yang telah dicermati lebih mendalam menunjukkan dari sisi dasar hukum perlu dilakukan revisi, dari sisi sistem dan prosedur perlu dikaji kembali tentang bagaimana agar bisa sederhana, dari sisi durasi perlu dibuat standar pelayanan, demikian juga perlu peningkatan penguatan kewenangan kelembagaan.

g. Politik

Tujuan pembangunan bidang politik Kabupaten Banyumas adalah terciptanya stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik

yang dinamis serta mampu mengakomodasikan secara maksimal setiap kepentingan dan kebutuhan rakyat di daerah.

Stabilitas politik di Kabupaten Banyumas secara umum relatif kondusif namun dengan dinamika politik yang fluktuatif, hal ini disebabkan banyaknya partai politik peserta Pemilu 2004 (23 buah), Parpol baru (8 buah), Ormas (173 buah), LSM (137 buah), belum dapat mengakomodasi aspirasi rakyat secara optimal, sehingga di wilayah sering ditemui adanya konflik antar elit partai, belum berjalannya etika politik, rendahnya kesadaran dan partisipasi politik dan menurunnya rasa nasionalisme/kebangsaan masyarakat yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan di daerah.

h. Keamanan dan ketertiban

Di era reformasi dan globalisasi dewasa ini, kehidupan masyarakat berubah dengan sangat cepat merambat masuk dalam kehidupan masyarakat kita yang didukung oleh pesatnya sarana prasarana informasi dan transportasi. Kesemuanya ini perlu diantisipasi karena akan berpengaruh pada kondisi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Perkembangan situasi politik dan kebijakan Pemerintah di tingkat pemerintah pusat sering kali berimbas pada eskalasi kerawanan di bidang sosial serta di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Euforia reformasi itu sendiri jika tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan dan perilaku anarki.

Dalam era otonomi daerah, kepada Pemerintah Daerah diberi kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berupaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut berupaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang tenteram, tertib dan aman.

Beberapa contoh permasalahan di bidang sosial di wilayah Kabupaten Banyumas yang implikasinya berpengaruh pada kondisi ketenteraman dan ketertiban umum, seperti munculnya usaha kaki lima ilegal dengan menggunakan trotoar dan badan jalan, timbulnya bangunan tidak memiliki izin, tempat usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan, reklame liar, kebersihan, tawuran pelajar, peredaran obat-obat terlarang dan minuman keras, perjudian serta masalah orang-orang penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan dan pekerja seks komersial. Belum lagi masalah unjuk rasa yang mengarah pada pemaksaan kehendak yang di luar koridor hukum dan sebagainya. Kesemuanya ini perlu dicari solusi pemecahannya yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijaksana serta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

i. Pemuda dan Olah Raga

Aktivitas pembinaan olah raga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kebanggaan daerah yang selama ini telah relatif diperhitungkan dalam kancah olah raga tingkat regional maupun nasional. Pada Pekan Olah Raga Nasional (PON) XV di Surabaya atlet Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Kontingen Jawa Tengah telah berhasil menyumbangkan medali. Demikian pula pada PORDA ke XII di Semarang pada tahun 2005, Kabupaten Banyumas berhasil mencapai juara II dengan mengumpulkan 72 medali emas, 50 medali perak dan 42 medali perunggu.

Pemberdayaan generasi muda melalui Karang Taruna dalam rangka mewujudkan kualitas dan melembaganya Karang Taruna yang berperan aktif dalam membantu menangani kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) oleh pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kondisi Karang Taruna sesuai dengan kriteria klasifikasi strata Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- o Karang Taruna dengan klasifikasi Tumbuh sebanyak 316 paguyuban Karang Taruna
- o Karang Taruna dengan klasifikasi berkembang sebanyak 11 paguyuban Karang Taruna
- o Karang Taruna dengan klasifikasi maju sebanyak 2 paguyuban Karang Taruna
- o Karang Taruna dengan klasifikasi berprestasi sebanyak 2 paguyuban Karang Taruna

j. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan suprastruktur sekaligus infrastruktur yang meliputi optimalisasi kinerja kognitif, afektif dan psikomotorik manusia. Sebab, kebudayaan adalah jaringan makna yang dirajut oleh manusia dalam hidupnya. Segala macam nilai yang dimaknai sebagai hal penting dalam kehidupan manusia, masuk kedalam koridor kebudayaan, sistem ideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem mata

pencapaian, sistem kepercayaan, sistem sosial dan lain-lain. Semua itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan setiap kelompok masyarakat dalam menyikapi diri dan lingkungan mereka dalam wacana proses kebudayaan.

Proses kebudayaan ini senantiasa berlangsung tanpa henti seiring dengan geliat kehidupan masyarakat pendukungnya. Berbagai ragam kebudayaan yang ada setiap saat berpeluang mengalami fluktuasi dan perubahan dalam perkembangannya. Pada suatu saat berkembang pesat sebagai bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, sementara pada saat yang lain memungkinkan terjadi kemunduran dan atau pemudaran sebagai akibat dari kepentingan masyarakat yang bersangkutan serta masuknya arus kebudayaan lain yang menjadikan kebudayaan tersebut terpinggirkan. Fluktuasi dan perubahan kebudayaan telah menjadi fakta yang tidak dapat disangkal, mengingat dalam prosesnya, berbagai ragam kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan lain melalui *cultural encounter* (pertemuan budaya) yang memungkinkan terjadinya asimilasi budaya, adaptasi budaya, hingga imposisi budaya.

Pelaksanaan Pembangunan Sektor Kebudayaan Lokal Banyumas mengacu pada elemen-elemen kebudayaan yang saat ini menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kesejarahan, (2) nilai tradisional, (3) kepercayaan terhadap Tuhan YME, (4) kesenian, (5) permuseuman, (6) kepurbakalaan, (7) kebahasaan, dan (8) kosastaraan. Realisasi kegiatan yang melibatkan aspek-aspek kebudayaan tersebut di atas dilaksanakan melalui empat cara, yaitu : (1) penggalian, (2) pelestarian, (3) pengembangan, dan (4) pemberdayaan.

k. Pemberdayaan Kelembagaan Dan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas pada umumnya masih rendah yang ditandai dengan masih banyaknya masyarakat dengan strata sosial kurang mampu yang bertempat tinggal pada rumah tidak layak huni; masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada belum berfungsi optimal; kelompok-kelompok penggerak ekonomi di Desa/Kelurahan belum sepenuhnya memberikan jaminan meningkatnya ekonomi masyarakat; potensi sumber daya yang ada belum didukung dengan penerapan teknologi yang tepat guna meningkatkan usaha ekonomi;

dan kurang berfungsinya sumber daya manusia yang tersedia memberikan kontribusi pada lembaga-lembaga yang ada di Desa/Kelurahan.

l. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Secara umum kondisi pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas masih membutuhkan perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak. Angka buta huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, APK,APS pd jenjang SLTP,SLTA dan PT partisipasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, Tingginya angka kematian ibu dan bayi, Rendahnya pemahaman masyarakat, keluarga khususnya suami tentang kesehatan dan gizi bagi ibu dan bayi, rendahnya kualitas perempuan dibidang ekonomi terutama dalam akses kredit usaha/modal kerja serta rendahnya ketrampilan perempuan, rendahnya partisipasi masyarakat dibidang politik dan tingginya kasus kekerasan berbasis gender dan anak adalah gambaran tingkat kemajuan daerah Kabupaten Banyumas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

m. Kehidupan beragama

Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Banyumas pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat antar pemeluk agama ditunjukkan dengan tersebarnya tempat-tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Tempat-tempat pendidikan agama berkembang dengan baik, seperti halnya tumbuh dan berkembangnya pondok pesantren, meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Banyumas.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan perhitungan masa bakti Bupati Banyumas Tahun 2003-2008, maka pada tahun 2008 Bupati Banyumas masih memiliki tugas perencanaan pembangunan tahun 2009. Oleh karena itu dokumen RPJM Daerah Transisi ini harus memuat pula kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2009.

Strategi pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2009 merupakan strategi transisi yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008. Strategi pembangunan Kabupaten Banyumas pada tahun 2009, dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang masih perlu penanganan pada tahun 2009.

A. ISU STRATEGI

Sebagaimana tertuang dalam perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, issue strategis yang masih akan dihadapi Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang, adalah :

1. Masih tinggi angka kemiskinan yang masih perlu ditangani pada tahun-tahun mendatang.
2. Masih tingginya angka pengangguran.
3. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
4. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan baik.
6. Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas pada saat ini belum cukup memadai.
7. Secara umum tingkat penerapan penegakkan hukum di Kabupaten Banyumas pada saat ini belum optimal.
8. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan

Isu-isu strategis diatas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu pokok, yaitu isu kesejahteraan masyarakat (terdiri dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan), isue kemandirian daerah (terdiri dari pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur investasi), dan isu pemerintahan demokratis (terdiri dari penegakkan hukum, dan pemerintahan demokratis).

B. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LANJUTAN

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 adalah dalam rangka pemantapan agenda pembangunan tahun 2007-2008 yaitu agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, agenda pemantapan kemandirian daerah dan agenda perwujudan pemerintahan demokratis.

1. Pemantapan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Melanjutkan upaya penurunan angka kemiskinan yang belum tuntas tertangani pada tahun 2008;
 - b. Melanjutkan upaya penurunan angka pengangguran yang belum tertuntaskan pada tahun 2008.
 - c. Melanjutkan kembali upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional.
 - d. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang belum tuntas tertangani pada tahun 2008 menuju target-target pendidikan nasional.
2. Pemantapan agenda pemantapan kemandirian daerah
 - a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang yang belum tertangani sepenuhnya pada tahun 2008 ;
 - b. Membangun infrastruktur investasi daerah khususnya penanganan infrastruktur jalan sebagai wujud upaya pemerintah dalam memberikan insentif kepada terwujudnya investasi yang memadai;
3. Pemantapan perwujudan pemerintahan demokratis.
 - a. Upaya penegakkan hukum khususnya dalam pelaksanaan Perda-perda Kabupaten Banyumas dan peningkatan kualitas pembinaan hukum kepada

masyarakat hingga tercapai angka kriminalitas yang semakin menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2008.

- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Memberahi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum optimal pada pelaksanaan pembangunan tahun 2008.

BAB IV

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAERAH

A. KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2009

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Banyumas cenderung membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 yaitu sebesar 4,48% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 3,31%. Meskipun masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional, namun kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas memberikan gambaran prospek ekonomi daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2009 yang semakin membaik.

Struktur ekonomi Perekonomian Kabupaten Banyumas masih didukung oleh sektor pertanian, yang rata-rata menyumbangkan 21,67 persen dari PDRB Kabupaten Banyumas. Disamping sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa merupakan penyumbang yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Banyumas. Perkembangan perekonomian yang terjadi menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari perekonomian agraris menuju ke perekonomian perdagangan dan jasa-jasa.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas pada tahun 2009 baik faktor internal maupun faktor eksternal masih menjadi tantangan yang cukup berat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pencapaian pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 sebesar 4,55% pada tahun 2008 diyakini akan tercapai dengan asumsi-asumsi faktor-faktor pengaruh internal maupun eksternal dapat di hadapi dengan berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan yang mampu menjamin bergerakinya ekonomi sektor riil dan pengembangan investasi daerah yang semakin baik.

Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006, tahun 2006 dan upaya tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2008, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2009 akan berada pada kisaran 4,75%. Angka pertumbuhan ini masih jauh dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi sebesar 6%, namun demikian dengan target pertumbuhan tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pelaksanaan pembangunan mengedepankan kebijakan-kebijakan pembangunan yang memihak rakyat kecil dan memberikan kemudahan-kemudahan

usaha bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah berkembang. Perkembangan UKM diharapkan akan semakin meningkatkan pemerataan pendapatan.

Kebutuhan investasi pembentukan modal tetap bruto diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75%. Investasi tersebut terdiri dari investasi swasta dan investasi pemerintah. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah meliputi : penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebesar 4,75% membutuhkan dukungan pembiayaan pembangunan baik pembiayaan swasta maupun pembiayaan pemerintah. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten Banyumas maka pembiayaan pembangunan yang berasal dari sumber pemerintah dapat digunakan sebagai pendorong tumbuhnya investasi swasta. Oleh karena itu kebijakan anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2009 akan dilakukan dengan :

1. Meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah ada dengan memperbaiki pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan serta transparansi pengelolaan pendapatan. Melakukan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah dengan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
2. Kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan anggaran pendidikan menuju pada pencapaian target alokasi 20% sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pembiayaan urusan kewenangan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, satuan organisasi (SKPD), program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
 - b. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan sebagai perekat, perwujudan keterpaduan pembangunan antara Kabupaten dan desa serta keterpaduan

usaha bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah berkembang. Perkembangan UKM diharapkan akan semakin meningkatkan pemerataan pendapatan.

Kebutuhan investasi pembentukan modal tetap bruto diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75%. Investasi tersebut terdiri dari investasi swasta dan investasi pemerintah. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah meliputi : penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebesar 4,75% membutuhkan dukungan pembiayaan pembangunan baik pembiayaan swasta maupun pembiayaan pemerintah. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten Banyumas maka pembiayaan pembangunan yang berasal dari sumber pemerintah dapat digunakan sebagai pendorong tumbuhnya investasi swasta. Oleh karena itu kebijakan anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2009 akan dilakukan dengan :

1. Meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah ada dengan memperbaiki pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan serta transparansi pengelolaan pendapatan. Melakukan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah dengan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
2. Kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan anggaran pendidikan menuju pada pencapaian target alokasi 20% sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pembiayaan urusan kewenangan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, satuan organisasi (SKPD), program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
 - b. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan sebagai perekat, perwujudan keterpaduan pembangunan antara Kabupaten dan desa serta keterpaduan

BAB V
POKOK POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah disusunlah **program-program prioritas** yang akan menentukan langkah utama pembangunan pada tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1). Program prioritas pemantapan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah :

Dalam rangka pemantapan agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat disusun pokok-pokok program pembangunan indikatif sebagai berikut :

- a. Program perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. Program penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja;
- c. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
- d. Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. Program *Wajardikdas* 9 tahun;
- f. Program penuntasan buta aksara;
- g. Program pembinaan dan pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Banyumasan;
- h. Program upaya kesehatan masyarakat;
- i. Program kebijakan manajemen pembangunan kesehatan;

2). Program prioritas pemantapan agenda pemantapan kemandirian daerah adalah :

Dalam rangka pemantapan agenda pembangunan pemantapan kemandirian daerah disusun pokok-pokok program pembangunan indikatif sebagai berikut:

- a. Program peningkatan efektifitas, efisiensi pelayanan perijinan dan investasi daerah;
- b. Program promosi penanaman modal;

- c. Program penyediaan fasilitas umum dan jaringan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi;
- d. Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- e. Program pembangunan infrastruktur;
- f. Program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa
- g. Program peningkatan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
- h. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan;
- i. Program peningkatan ketahanan pangan;
- j. Program pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
- k. Program penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM);
- l. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3). Program prioritas pemantapan agenda perwujudan pemerintahan demokratis adalah :

Pemantapan agenda pembangunan perwujudan pemerintahan demokratis disusun pokok-pokok program pembangunan indikatif sebagai berikut :

- a. Program pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah
- b. Program perencanaan tata ruang
- c. Program peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
- d. Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- e. Program pengembangan sarana dan prasarana informasi pemerintahan (e-Government)
- f. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

BAB VI PENUTUP

A. POSISI DOKUMEN PROGRAM INDIKATIF

Program indikatif Kabupaten Banyumas tahun 2009 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 dimana dalam dokumen tersebut telah memberikan arahan pokok kebijakan pembangunan tahun 2009 namun belum dilengkapi dengan indikasi program. Program indikasi ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dokumen ini disusun dengan mengakomodasi perubahan-perubahan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Disamping menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, program indikatif kabupaten Banyumas Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. KAJIDAH PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program, maka dalam pelaksanaan Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 perlu penguatan peran (partisipasi) dan komitmen seluruh stakeholder.

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka kepada masing-masing pelaku pembangunan diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



BAB VI
PENUTUP

A. POSISI DOKUMEN PROGRAM INDIKATIF

Program indikatif Kabupaten Banyumas tahun 2009 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 dimana dalam dokumen tersebut telah memberikan arahan pokok kebijakan pembangunan tahun 2009 namun belum dilengkapi dengan indikasi program. Program Indikasi ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dokumen ini disusun dengan mengakomodasi perubahan-perubahan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, program indikatif kabupaten Banyumas Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. KAIIDAH PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program, maka dalam pelaksanaan Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 perlu penguatan peran (partisipasi) dan komitmen seluruh stakeholder.

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka kepada masing-masing pelaku pembangunan diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Selaku	
2.	Aselubany.	
3.	Ka. Boppeda	



**MATRIKS PROGRAM INDIKATIF
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2009**

1. PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DI SELURUH SKPD

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka pelayanan internal SKPD.
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelayanan internal SKPD.
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengaturan PNS dalam rangka meningkatkan disiplin PNS,
4.	Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pemindahan dan purna tugas PNS
5.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan, pembinaan teknis, pembinaan fungsional termasuk pengiriman diklat, bintek bagi PNS dalam SKPD bersangkutan.
6.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan pencapaian kinerja dan keuangan, termasuk pengembangan sistem informasi manajemen keuangan SKPD.

2 URUSAN WAJIB

2.1. PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kelompok belajar (Kejar) paket A dan B serta dan menyediakan pelayanan pendidikan informal untuk masyarakat yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan formal.
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal.
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PAUD pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.
4.	Pendidikan Dasar	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dasar pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan, termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional.
5.	Pendidikan Menengah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan menengah pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan, termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional.
6.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik pada lembaga pendidikan formal dan meningkatkan pelayanan pendidikan guru serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.
7.	Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya baca dan mengembangkan kualitas perpustakaan siswa sekolah dan masyarakat.
8.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerataan kualitas penyelenggaraan managerial pendidikan.
9.	Pendidikan Non Formal	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah pada non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.

10.	Pendidikan Luar Biasa	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa pada jalur formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.
11.	Fasilitasi Pendidikan Tinggi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pendidikan tinggi dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.

2.2. KESEHATAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), generasi muda dan lanjut usia, peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2.	Pengembangan Lingkungan Sehat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana sanitasi dasar dan sarana air bersih skala rumah tangga, pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat.
3.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya, peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), dan pengobatan dasar.
4.	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III Rumah Sakit (RS), pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana Rumah Sakit, pengadaan obat dan perbekalan RS, pengembangan pelayanan kedokteran keluarga, dan peningkatan peran serta sektor swasta dalam UKP.

5.	Pengendalian Penyakit	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko termasuk pelayanan kesehatan haji dan transmigrasi, peningkatan imunisasi, penemuan dan pengobatan penderita, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) serta bencana.
6.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Memuat Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan gizi, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), peningkatan surveilans gizi, penanggulangan gizi, penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Kekurangan Energi Kronis (KEK), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kekurangan Vitamin A (KVA) dan kekurangan zat gizi mikro lainnya serta revitalisasi Posyandu.
7.	Sumberdaya Kesehatan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui diklat tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan.
8.	Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit, pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan obat, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan.
9.	Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
10.	Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana/prasarana kesehatan.
11.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian.

2.3. PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi prasarana jalan dan jembatan desa dan prasarana air bersih.
2.	Penyediaan Fasilitas Umum	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum di daerah-daerah strategis dalam rangka menciptakan pelayanan umum kepada masyarakat dan membangun citra positif daerah dalam kerangka pengembangan investasi daerah.
3.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan fungsi jalan dan jembatan termasuk penanganan keadaan darurat/ khusus dan bencana alam.
4.	Peningkatan Jalan dan Pengantian Jembatan	Memuat kegiatan-kegiatan peningkatan kondisi struktur dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan agar dapat melayani arus lalu lintas dengan maksimal.
5.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Memuat kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan termasuk atribut jalan dan jembatan guna menunjang kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pemakai jalan.
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinaargaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana termasuk sistem informasi manajemen.
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Air Lainnya.	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, operasional, rehabilitasi, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi (termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi).
8.	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Memuat kegiatan-kegiatan penyediaan, penggunaan, pengembangan, pengusahaan sarana dan prasarana air baku.
9.	Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumberdaya Air Lainnya	Memuat kegiatan-kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan sumberdaya air lainnya.

10.	Pengendalian Banjir	Memuat kegiatan-kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang disebabkan oleh daya rusak air.
11.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi percepatan pembangunan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan.
12.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan kinerja pengelolaan air minum, air limbah, dan drainase.
13.	Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan kinerja pengelolaan drainase.
14.	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembangunan gedung public (dibiayai oleh pemerintah) termasuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta layanan informasi bangunan dan uji.

2.4. PERUMAHAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pembangunan Perumahan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi stimulan (pengaturan pembinaan pembangunan dan pengawasan) dalam pembangunan perumahan swadaya, perumahan skala besar, rumah sederhana sehat, dan penyehatan lingkungan permukiman dan fasilitasi pembangunan sarana prasarana perumahan permukiman, jalan lingkungan, drainase dan fasilitas umum lainnya.
2.	Lingkungan Sehat Perumahan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
3.	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan stimulant dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh, perbatasan, desa Daerah Tujuan Wisata, Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan peningkatan peran serta masyarakat/pelaku

		pembangunan perumahan melalui Badan Koordinasi Penataan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten (BKP4K).
--	--	--

2.5. PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Perencanaan Tata Ruang	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan/perencanaan tata ruang yang melibatkan ketersediaan/memperbaharui data, sampai dengan terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang.
2.	Pemanfaatan Tata Ruang	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan dokumen perundang-undangan yang merupakan instrument pengendalian pembangunan serta memberdayakan masyarakat dalam pemahaman tata ruang, dalam rangka terwujudnya struktur ruang yang jelas yang didukung dengan sistem informasi yang jelas, akurat dan cepat.
3.	Pengendalian Tata Ruang	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh semua pihak dalam wujud kegiatan perizinan, pemantauan lapangan, penegakan hukum, yang melibatkan unsur kelembagaan, tokoh masyarakat, pakar ilmu dan peranserta masyarakat.

2.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	F pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya membangun system perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan efektif.
2.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah di berbagai bidang meliputi perencanaan umum, perencanaan bidang ekonomi, perencanaan bidang prasarana wilayah dan perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya .
3.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi termasuk dalam pelaksanaan

	Pembangunan Daerah	pelaporannya.
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan (termasuk penganggaran), penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan pengendalian, evaluasi, kajian, studi serta penelitian dan pengembangan.

2.7. PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan rehabilitasi fasilitas perhubungan termasuk fasilitasi penetapan kebijakan manajemen transportasi.
2.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan angkutan bagi masyarakat agar terjamin pelayanan mobilitasi masyarakat yang murah dan nyaman.
3.	Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan prasarana jalan agar terwujud keamanan lalulintas termasuk pengaturan pengoperasian kendaraan bermotor.

2.8. LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya alam dalam rangka mempertahankan dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya termasuk peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi sumberdaya alam dalam rangka mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam dan reklamasi bekas pertambangan.
3.	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

	Alam dan Lingkungan Hidup.	
4.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global, termasuk pengurangan resiko terjadinya bencana serta penegakan hukum lingkungan.
5.	Pengelolaan persampahan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk pengaturan kebijakan pengelolaan persampahan milik masyarakat
6.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kota.

2.9. PERTANAHAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pengembangan sistem informasi pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

2.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kependudukan dan sistem informasi kependudukan

2.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Peningkatan Kualitas Hidup	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi, advokasi dan mediasi peningkatan kualitas

2.13. SOSIAL

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Perindungan dan Pembinaan Masyarakat Miskin	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pembinaan masyarakat miskin dalam kehidupan bermasyarakat.
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi warga panti asuhan/panti jompo, pembinaan dan pelatihan ketrampilan para penyandang cacat dan trauma dalam penghidupan dan kehidupan bermasyarakat (akibat korban bencana).Mengembalikan dan melindungi fungsi sosial bagi para penyandang cacat dan trauma (akibat korban bencana) termasuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar yang dilakukan di Panti dan Non Panti serta pembinaan eks penyandang penyakit sosial.
3.	Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar hidup lebih baik layak dan bermartabat.
4.	Pembinaan Anak Terlantar	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak-anak terlantar.
5.	Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab social masyarakat dalam pelayanan sosial dan PSKS, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam mengembangkan dan melestarikan sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
6.	Pemberdayaan Organisasi Sosial	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi lembaga-lembaga social (Orsos, Dunia Usaha dll) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.14. KETENAGAKERJAAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Perluasan Kesempatan Kerja	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penciptaan kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja lokal, regional, nasional maupun internasional termasuk penyelenggaraan <i>job market fair</i> .
2.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan, keahlian, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja termasuk peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.
3.	Perlindungan dan pengembangan kelembagaan Tenaga Kerja	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan hubungan kerja yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja termasuk penetapan upah minimum.

2.15. KOPERASI DAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Penguatan, Pengembangan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diversifikasi usaha dan sistem distribusi koperasi, pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi dan kelembagaan KUKM, struktur manajemen, kewirausahaan dan permodalan serta pengembangan jaringan kemitraan dan usaha penciptaan iklim kondusif.
2.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mewujudkan iklim usaha kecil yang kondusif dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan usaha kecil menengah.
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas koperasi sehingga dapat menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi yang membedakan dengan badan usaha lainnya.

2.16. PENANAMAN MODAL

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Peningkatan Efektifitas dan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelayanan perijinan,

	Efisiensi Pelayanan Investasi Daerah	penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif, pengembangan dan pengendalian penanaman modal serta pengkajian sumberdaya dan daya tarik investasi.
2.	Promosi Penanaman Modal	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi penanaman modal antara lain bussines matching, membangun citra Banyumas dan mengembangkan sistem kerjasama antar daerah dan antar negara.
3.	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendorong berkembangnya kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung berkembangnya investasi.

2.17. KEBUDAYAAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya Banyumasan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya termasuk fasilitasi kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Banyumasan.
2.	Pembinaan Keagamaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan agar terwujud kehidupan beragama yang baik dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
3.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam pembangunan termasuk belenegara, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi produktif.
2.	Pembinaan Lembaga/	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pemuda

	Organisasi	dalam rangka partisipasi pemuda dalam pembangunan.
3.	Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Olahraga	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet dan Pelatih Olahraga termasuk pengembangan sarana prasarana olah raga.
4.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan olah raga.
5.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemasyarakatan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
6.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong partisipasi pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan.
2.	Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran serta kepatuhan hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat termasuk fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum dan HAM.
3.	Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong peranserta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
4.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan kenyamanan dan keamanan sosial dengan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan penyakit masyarakat.
5.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perwujudan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesadaran bela Negara serta meningkatkan kemampuan pengamanan dan

		pengembangan kemampuan Ratih dan Satuan Linmas untuk antisipasi ancaman bahaya bencana.
6.	Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pendidikan Politik Rakyat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, dan pengembangan kehidupan demokrasi di seluruh komponen masyarakat.

2.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
2.	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah.
3.	Penyusunan dan Pembaharuan Peraturan Perundangan di Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, evaluasi peraturan perundangan di daerah termasuk pengembangan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum.
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Informasi pemerintahan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana informasi berbasis teknologi informasi untuk membangun pemerintahan elektronik.
5.	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD, dan pengembangan kapasitas daerah, termasuk penataan kelembagaan, pemberantasan KKN dalam rangka <i>mewujudkan good governance</i> .

6.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan kompetensi lembaga perwakilan rakyat daerah.
7.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan kedinasan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
8.	Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD)	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan Badan Perwakilan Desa (BPD).
9.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kerjasama antar daerah, antar lembaga dan pemerintahan serta pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
10.	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan melestarikan dan meningkatkan penerimaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.
11.	Penyelenggaraan kepegawaian dan Perangkat Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur (aparatur teknis dan aparatur pengawas) dan perangkat daerah serta pengembangan sistem administrasi kepegawaian.
12.	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat dengan stimulan-stimulan pembangunan daerah.
13.	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong kinerja pemerintahan desa dengan meningkatkan fasilitasi keuangan desa.
14.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan daerah.

15.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong berkembangnya sarana dan prasarana pemerintahan berbasis elektronik.
16.	Pengelolaan Aset Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendataan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset termasuk pengembangan sistem informasi asset daerah.
17.	Sarana dan Prasarana Aparatur pemerintah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur guna mendukung pelaksanaan fungsi pembangunan di daerah.
18.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta dedikasi, etika dan moral aparatur pemerintah daerah.
19.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong terwujudnya ketersediaan peraturan perundangan yang menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
20.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pengetahuan, profesionalisme dan ketrampilan serta dedikasi, etika dan moral aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.
21.	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong dan menciptakan sumberdaya aparatur yang profesional.
22.	Pengembangan Penelitian Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong pengembangan penelitian daerah dan fasilitasi integrasi pengembangan penelitian dengan penelitian perguruan tinggi

2.21. KETAHANAN PANGAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, penganekaragaman pangan, distribusi dan konsumsi pangan termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan SDM dan peningkatan daya beli masyarakat..

2.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penguatan pemerintah desa, tata pemerintahan, tata kemasyarakatan dan tata ruang desa.
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam tata pemerintahan, tata kemasyarakatan dan tata ruang desa termasuk penyelenggaraan bulan bakti golong royong dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengembangkan lembaga ekonomi masyarakat desa, lembaga ekonomi pedesaan, meningkatkan akses informasi komunikasi dan eksistensi lembaga.
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pengetahuan, profesionalisme dan ketrampilan serta dedikasi, etika dan moral aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa secara optimal.
5.	Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan dan memotivasi kelompok perempuan pedesaan agar berperan aktif dalam membangun desanya.
6.	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pembentukan, penguatan, peranserta kelembagaan di tingkat desa dalam rangka peningkatan pemerintahan dan pembangunan desa.
7.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan kelompok, BBGRM dan P2MD

2.23. STATISTIK

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Penyusunan Data/Informasi/ Statistik	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan dan analisis dan penyajian data dan informasi.

2.24. KEARSIPAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi melakukan langkah-langkah atau mekanisme penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dalam rangka jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen-dokumen yang disimpan serta jaminan dokumen tersebut dapat dijaga keutuhannya (tidak rusak) dalam kurun waktu tertentu.
2.	Penataan Sistem Administrasi Kearsipan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan dan pembinaan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan serta pelayanan informasi kearsipan.
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tidak rusak atas dokumen yang disimpan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dengan melakukan pemeliharaan secara rutin sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan kembali dokumen yang telah dikelola secara tepat, yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelola arsip daerah sesuai dengan jenjang dan tugasnya masing-masing.

2.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Komunikasi Kerjasama Informasi dan Media Masa	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasana komunikasi dan informasi, penyebaran informasi pembangunan daerah serta pengembangan akses informasi komunikasi dan media masa.

2.	Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pengetahuan, profesionalisme dan ketrampilan serta dedikasi, etika dan moral aparatur bidang komunikasi dan informatika.
----	--	---

2.26. PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, termasuk pengembangan minat baca masyarakat termasuk sarana dan prasarana serta sistem informasi perpustakaan.
2.	Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.

3. URUSAN PILIHAN

3.1. PERTANIAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Agribisnis	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, perlindungan produk, diversifikasi produk pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penyuluhan pertanian, penanganan gagal panen, sarana dan prasarana pendukung termasuk pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Sentra Produksi.
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam rangka bimbingan berusaha tani, penguatan modal, kelembagaan keuangan termasuk peluang kerjasama dengan mitra usaha.
3.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memfasilitasi pemasaran produksi pertanian/perkebunan sehingga dapat lebih menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan volume distribusi melalui jangkauan pasar yang lebih luas dan sistem pemasaran yang lebih terintegrasi.

4.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian/perkebunan, meningkatkan nilai jual produk pasca panen dan mengurangi dampak serangan OPT terhadap tanaman pertanian/perkebunan sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani.
5.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian agar dapat semakin meningkatkan keberhasilan pembinaan kepada masyarakat.
6.	Prevensi Dan Penanggulangan Penyakit Temak	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya menekan angka kesakitan dan kematian temak, melalui pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit strategis antara lain surveilance, vaksinasi dan pengobatan.
7.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi dan produktivitas temak melalui upaya kemitraan usaha peternakan dan perikanan.

3.2. KEHUTANAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pemanfaatan dan penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya kehutanan, penertiban industri yang memanfaatkan hasil hutan, serta pengembangan aneka usaha hasil hutan, pengendalian penatausahaan hasil hutan dan industri kehutanan.
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan hasil hutan, penanganan daerah penyangga kawasan konservasi, serta penguatan kawasan konservasi.
3.	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencegah, membatasi dan mengurangi kerusakan fisik hutan, termasuk kawasan dan hasil-hasilnya yang disebabkan oleh perubahan,

		penebangan liar, penjarahan, kebakaran, bencana alam, hama penyakit, menjaga hak-hak perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan hutan.
4.	Pembinaan Dan Pernerbitan Industri Hasil Hutan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengembangkan sarana dan prasarana pendukung serta peranserta masyarakat dalam membina dan meningkatkan ketertiban industri hutan.

3.3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas peningkatan, pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan dan konservasi air tanah.
2.	Pengembangan keneagalistrikan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, pengembangan energi terbarukan, dan pengendalian dan pengawasan jasa usaha kelitrikan.
3.	Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat terhadap bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan geologi tata lingkungan.
4.	Pengembangan Energi Alternatif	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif guna mendukung sumberdaya energi yang dapat diperbaharui.
5.	Pengelolaan Migas Hilir	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, penetapan quota volume migas dan pengembangan konversi migas.

3.4. PARIWISATA

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan jaringan (pelaku dan wilayah pariwisata), produk termasuk pengadaan bahan-bahan dan promosi pariwisata.
2.	Pengembangan Destinasi Wisata	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan obyek wisata dan fasilitas obyek wisata

3.	Pengembangan Produk Pariwisata	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan produk wisata termasuk pengembangan SDM, kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dan antar daerah.
----	--------------------------------	---

3.5. PERIKANAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Budidaya	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pengelolaan sumberdaya perikanan termasuk peningkatan produksi, diversifikasi produk, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penguatan modal, sarana/prasarana pendukung termasuk pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu.

3.6. PERDAGANGAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan jumlah, variasi dan distribusi produk perdagangan, kelembagaan, SDM, permodalan, jejaring dan kerjasama perlindungan dan pelayanan konsumen, serta sarana/prasarana pasar guna terwujudnya perdagangan yang baik.
2.	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tingkat perlindungan konsumen dari produk-produk tidak sesuai standart.
3.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima guna menjaga kualitas lingkungan pasar serta mengembangkan pemberdayaan pedagang kaki lima.

3.7. INDUSTRI

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Industri Kecil, Menengah (IKM)	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Industri Kecil, Menengah (IKM) melalui penyediaan kebutuhan bahan baku, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pemasaran, permodalan, kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SDM), standarisai kerjasama

		serta pengembangan IKM berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan termasuk pengembangan klaster.
2	Penataan Struktur Industri	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam rangka peningkatan penggunaan bahan baku lokal dan produk dalam negeri, optimalisasi keterkaitan indutsi hulu dan hilir, penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penunjang industri, pengembangan kawasan industri, perlindungan dan pengawasan industri dan pemanfaatan industri berbasis Information Communication Teknilogy (ICT).
3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan penguasaan teknologi produksi agro industri dan stimulasi pengembangan peralatan industri non agro.
4	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan potensi sentra-sentra industri dengan penyediaan data dan informasi potensi dan membangun situs dibidang industri dan perdagangan.

3.8. KETRANSMIGRASIAN

NO	PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pemindahan calon transmigrasi dan lokasi serta masyarakat daerah penerima termasuk melakukan fasilitasi kerjasama antara daerah pengirim dan penerima.
2.	Transmigrasi Regional	Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyiapan peningkatan aktivitas tranmigrasi antar daerah kabupaten dalam wilayah provinsi.

